

Manajemen Data Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Pada Manajemen Dapodik Kabupaten Timor Tengah Selatan)

Nikson Anin¹, Ajis Salim Adang Djaha², Nursalam²

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

E-mail: aninnikson@gmail.com

Article History:

Received: 29 Juni 2026

Revised: 24 Agustus 2026

Accepted: 12 September 2026

Keywords:

Data Management, DAPODIK, Management Information System, Decision Making, Educational Policy

Abstract: This study aims to analyze the management of the Basic Education Data System (Data Pokok Pendidikan / DAPODIK) in supporting educational policy decision-making in South Central Timor Regency. The research employed a qualitative approach using an instrumental case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and subsequently analyzed using Creswell's model with triangulation techniques to ensure data validity. The findings reveal that DAPODIK data management has not been implemented optimally and continues to experience dysfunction in administrative processes, reporting systems, database management, and data retrieval systems. The main challenges include limited internet infrastructure, low operator competency, delays in data synchronization, weak institutional coordination, and poor data integrity. These conditions directly affect the quality of educational decision-making, as reflected in the decline of Physical Special Allocation Fund (Dana Alokasi Khusus / DAK) allocations due to invalid data. Supporting factors include clear regulations, school principal support, operator competency, and automated validation systems. Improving the system requires strengthening operator capacity, enhancing technological infrastructure, conducting regular data audits, strengthening coordination mechanisms, and optimizing supervision to improve data validity and the effectiveness of data-driven educational policies.

PENDAHULUAN

Manajemen data merupakan komponen fundamental dalam sistem informasi manajemen yang berperan memastikan data tersedia secara akurat, mutakhir, aman, dan siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi (Sudirman et al., 2020). Kualitas pengelolaan data sangat menentukan kualitas informasi yang dihasilkan, karena kesalahan data berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak tepat dan berdampak pada kegagalan penyelesaian masalah

organisasi. Dalam era digital, kebutuhan terhadap sistem informasi yang mampu mengelola data secara efektif menjadi semakin penting untuk mendukung efisiensi operasional dan optimalisasi pengambilan keputusan manajerial (Darwis, 2009).

Dalam sektor pendidikan, pengelolaan data yang efektif menjadi kebutuhan strategis karena pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memerlukan tata kelola efisien untuk menghasilkan layanan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan (Nasyirwan, 2015). Perkembangan teknologi digital memungkinkan pengelolaan informasi pendidikan secara terintegrasi mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi informasi guna mendukung perencanaan dan kebijakan pendidikan yang lebih produktif, transparan, dan akuntabel (Vasilevska et al., 2017; Al-Mamary, Shamsuddin, & Aziati, 2015; Burinskiene & Pipiriene, 2013). Dalam konteks Indonesia, digitalisasi tata kelola pendidikan diwujudkan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yaitu sistem pendataan nasional yang berfungsi sebagai sumber utama data pendidikan untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan implementasi kebijakan pendidikan nasional.

Meskipun Dapodik telah menjadi instrumen utama dalam pengelolaan data pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi operator, kesalahan input data, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta permasalahan validitas data. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas sistem informasi manajemen dalam mendukung pengambilan keputusan pendidikan (Nasrullah, 2015). Pengelolaan data yang tidak optimal menyebabkan keterlambatan informasi, kesalahan perencanaan, distribusi anggaran yang tidak tepat sasaran, serta rendahnya kualitas keputusan strategis dalam organisasi pendidikan (Sitanggang, Rahmi, & Sihombing, 2018).

Permasalahan tersebut menjadi relevan dalam konteks Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tahun 2024, Kabupaten TTS berada pada tiga peringkat terbawah capaian SPM pendidikan di Provinsi NTT. Rendahnya capaian tersebut diduga berkaitan erat dengan lemahnya manajemen data pendidikan dalam sistem Dapodik. Dapodik memiliki hubungan langsung dengan pemenuhan SPM karena menjadi sumber utama data terkait peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, monitoring evaluasi, perencanaan anggaran, serta implementasi berbagai kebijakan pendidikan seperti BOS, KIP, dan pembangunan infrastruktur sekolah. Ketidakakuratan data menyebabkan kebijakan tidak tepat sasaran, ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan, keterlambatan bantuan, dan terganggunya evaluasi kualitas pendidikan daerah.

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai kendala implementasi Dapodik, seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya pelatihan operator, bug sistem, ketidaksesuaian perangkat, serta kesalahan input data yang memengaruhi kualitas pengambilan keputusan pendidikan (Damayanti, Pratiwi, & Sanusi, 2024). Penelitian Arwandi, Damopolii, dan Hasan (2024) juga menegaskan bahwa efektivitas implementasi Dapodik sangat dipengaruhi oleh kompetensi operator, sistem verifikasi data, serta integrasi sistem informasi pendidikan. Namun, penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek implementasi teknis sistem di tingkat sekolah, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis keterkaitan manajemen data Dapodik terhadap pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah daerah masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan *novelty* berupa analisis mendalam mengenai hubungan antara manajemen data Dapodik dan proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan pada level pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi

efektivitas pengelolaan data Dapodik serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas data pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

LANDASAN TEORI

Sistem Informasi Manajemen

Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berinteraksi, terintegrasi, dan bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu (Ludwig & Reynold, 1991; Davis, 1995; McLeod, 2001). Suatu sistem memiliki karakteristik berupa komponen, batas sistem, lingkungan, input, proses, output, serta tujuan yang saling berkaitan dalam membentuk suatu mekanisme kerja yang terstruktur (Hutahaean, 2015). Informasi sendiri merupakan hasil pengolahan data yang memiliki makna, relevansi, dan nilai guna bagi pengguna, khususnya sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan (Darawan & Kunkun, 2013; Murdick, Ross, & Calaggett, 1997). Kualitas informasi ditentukan oleh tingkat akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi informasi yang dihasilkan (Mulyanto, 2009).

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi (Griffin, 2021; Terry, 2010; Handoko, 2009; Hasibuan, 2013). Fungsi utama manajemen meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* yang menjadi dasar dalam pengelolaan seluruh aktivitas organisasi (Edison, 2016). Integrasi antara sistem, informasi, dan manajemen membentuk Sistem Informasi Manajemen (SIM), yaitu sistem berbasis teknologi yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyajikan informasi guna mendukung operasional organisasi dan pengambilan keputusan manajerial (Davis, 2009). SIM berperan meningkatkan efisiensi operasional, kualitas perencanaan, aksesibilitas data, produktivitas organisasi, serta mendukung strategi organisasi secara berkelanjutan (Rusdiana & Irfan, 2014; Nofa, 2018; O'Brien & Marakas, 2010).

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah pilihan yang tersedia secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu (Bowo, 2008; Böhm & Brun, 2008). Dalam perspektif manajemen, pengambilan keputusan menjadi fungsi fundamental yang berkaitan erat dengan proses perencanaan dan pengawasan organisasi (Hansen & Mowen, 2014). Proses pengambilan keputusan meliputi identifikasi masalah, penyusunan alternatif solusi, evaluasi alternatif, pemilihan keputusan, implementasi, serta evaluasi hasil keputusan yang telah diambil (Syafriana & Nu'man, 2010).

Herbert A. Simon menjelaskan bahwa pengambilan keputusan berlangsung melalui empat tahapan utama, yaitu *intelligence phase* (identifikasi masalah), *design phase* (perancangan alternatif solusi), *choice phase* (pemilihan alternatif terbaik), dan *implementation phase* (pelaksanaan keputusan) (Kadarsah, 2011). Dalam praktik organisasi modern, proses ini didukung oleh Sistem Pendukung Keputusan yang membantu pengambil kebijakan dalam mengolah data dan menghasilkan keputusan yang lebih cepat, objektif, dan akurat, khususnya pada kondisi semi-terstruktur maupun tidak terstruktur (Kusrini, 2007).

Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) merupakan sistem data pendidikan nasional terintegrasi yang menjadi sumber utama informasi pendidikan di Indonesia dan berfungsi mendukung perencanaan, pengelolaan, serta evaluasi kebijakan pendidikan nasional (Wahyuni, Jasticia, & Nugraha, 2018). Sistem ini dikembangkan sebagai respons terhadap berbagai

permasalahan pengelolaan data pendidikan, seperti belum adanya data terpusat, lemahnya integrasi antar data, serta rendahnya efisiensi metode pengumpulan data manual (Sukri, Aryanto, & Diansyah, 2019).

DAPODIK merupakan sistem berbasis daring (*online real-time*) yang mengelola data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, rombongan belajar, serta berbagai informasi pendidikan lainnya. Data yang dihasilkan menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan kebijakan pendidikan, distribusi anggaran, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta berbagai program pendidikan lainnya (Utama, Herlambang, & Aryadita, 2019; Wahyuni, 2015). Oleh karena itu, kualitas data dalam DAPODIK sangat menentukan efektivitas pengambilan keputusan pendidikan, sehingga akurasi, validitas, kelengkapan, dan pembaruan data menjadi aspek penting dalam pengelolaannya (Aris, Andriani, Romondor, & Sari, 2016).

Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi dan pengelolaan DAPODIK memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas manajemen pendidikan dan pengambilan keputusan organisasi pendidikan. Penelitian Annida dan Syahrani (2022), Damayanti, Pratiwi, dan Sanusi (2024), serta Faridah, Saputra, dan Ramadhani (2023) menegaskan bahwa efektivitas DAPODIK dipengaruhi oleh strategi manajemen, kualitas infrastruktur teknologi, kompetensi operator, serta mekanisme pengawasan data. Penelitian Novaliendry dan Zahra (2022) menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan berbasis data mampu meningkatkan kualitas keputusan organisasi, sedangkan Nursugustin dan Nasution (2024) menekankan pentingnya strategi manajemen data yang efektif dalam meningkatkan kualitas basis data.

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada implementasi teknis sistem, pengelolaan operasional DAPODIK, dan pengembangan sistem pendukung keputusan. Kajian mengenai hubungan manajemen data DAPODIK dengan proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, masih terbatas. Kondisi ini menjadi *research gap* sekaligus *novelty* penelitian untuk menganalisis pengaruh manajemen data DAPODIK terhadap efektivitas pengambilan keputusan kebijakan pendidikan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental untuk mengeksplorasi secara mendalam manajemen data Dapodik dalam mendukung proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan pengelolaan data pendidikan, sedangkan studi kasus instrumental digunakan untuk mengkaji kasus spesifik manajemen data sebagai upaya memahami isu secara empiris sekaligus mengembangkan pemahaman teoritis terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dipilih secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah tersebut termasuk tiga kabupaten dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan terendah di Provinsi NTT. Fokus penelitian meliputi: (1) manajemen data Dapodik, yang mencakup sistem administrasi dan operasional, sistem pelaporan manajemen, sistem basis data, sistem pencarian data, dan pengelolaan data; serta (2) faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem informasi manajemen data, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam mendukung pengambilan keputusan pendidikan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, laporan, serta arsip yang berkaitan dengan pengelolaan Dapodik dan kebijakan pendidikan. Informan penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, meliputi operator sekolah, kepala sekolah, guru, serta pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terlibat langsung dalam pengelolaan data Dapodik dan proses pengambilan keputusan pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terbuka (*open-ended interview*) untuk menggali pengalaman, pengetahuan, dan pandangan informan terkait fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa arsip, laporan, tabel, maupun dokumen administratif, sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan data yang berlangsung selama penelitian.

Analisis data mengacu pada model Creswell (2015) yang meliputi tahapan: mengorganisasi dan mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, melakukan proses *coding*, mengembangkan kategori dan tema, menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif, serta menginterpretasikan makna temuan berdasarkan keterkaitan antara data empiris dan landasan teori. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, penggunaan bahan referensi pendukung, serta member check untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi data penelitian (Miles & Huberman, 2007; Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen data melalui Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) memiliki peran strategis sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan, terutama dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemerataan tenaga pendidik, pencairan tunjangan guru, serta perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan data DAPODIK secara ideal mencakup sistem administrasi dan operasional yang meliputi prosedur pengumpulan data, pemutakhiran berkala, verifikasi, validasi, sinkronisasi, serta pengelolaan data pada seluruh jenjang pendidikan (Sumber: Wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, 2025).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa secara normatif prosedur pengelolaan DAPODIK telah diatur secara sistematis melalui regulasi nasional, namun implementasinya di Kabupaten TTS belum berjalan optimal. Kendala utama ditemukan pada kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan jaringan internet di banyak wilayah blank spot, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia operator sekolah yang menyebabkan proses input, pembaruan, dan sinkronisasi data sering terlambat. Kondisi ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara prosedur ideal dengan praktik aktual di lapangan, terutama pada proses sinkronisasi data, verifikasi oleh dinas pendidikan, dan pengusulan data melalui sistem KRISNA.

Penelitian juga menemukan bahwa sistem administrasi DAPODIK sangat bergantung pada operator sekolah sebagai pelaksana utama. Pada banyak sekolah, operator merangkap tugas sebagai guru sehingga beban kerja yang tinggi berdampak pada meningkatnya risiko keterlambatan dan kesalahan input data (Sumber: Wawancara dengan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, 2025). Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan jumlah operator tetap di sekolah-sekolah terpencil yang menyebabkan pengelolaan

data tidak berjalan maksimal.

Dari aspek operasional, penelitian menunjukkan bahwa sebagian operator sekolah di wilayah terpencil seperti Kecamatan Kuanfatu, Noebaba, dan beberapa wilayah pegunungan harus berpindah ke pusat kecamatan atau Kota Soe hanya untuk memperoleh akses internet guna melakukan sinkronisasi data. Selain itu, pelaksanaan pembaruan data dilakukan sepanjang tahun ajaran dan menjadi sangat kritis menjelang periode cut-off karena data yang tidak tervalidasi akan berdampak langsung pada program pemerintah di sektor pendidikan (Sumber: Wawancara dengan Operator Sekolah Kecamatan Amanuban Tengah, 2025).

Temuan lain menunjukkan bahwa akurasi data menjadi faktor paling menentukan efektivitas sistem DAPODIK karena seluruh kebijakan pendidikan nasional bergantung pada validitas data yang diinput sekolah. Ketidakakuratan data terbukti berdampak langsung terhadap penyaluran bantuan pendidikan. Analisis dokumen KRISNA menunjukkan bahwa alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan Kabupaten TTS mengalami penurunan drastis dari Rp15,6 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp543 juta pada tahun 2025 akibat kualitas data DAPODIK yang tidak memenuhi persyaratan sistem. Kasus lain ditemukan pada sekolah yang gagal memperoleh bantuan rehabilitasi gedung karena kondisi kerusakan bangunan tidak diperbarui dalam sistem (Sumber: Wawancara Guru SMPN Kecamatan Amanuban Barat, 2025).

Penelitian selanjutnya menemukan bahwa kepatuhan terhadap jadwal sinkronisasi dan pelaporan data masih menjadi persoalan serius. Banyak sekolah terlambat melakukan sinkronisasi akibat keterbatasan internet, data yang belum lengkap, server pusat yang sering mengalami overload menjelang batas akhir sinkronisasi, serta adanya error validasi data seperti ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berdasarkan laporan monitoring DAPODIK Tahun Ajaran 2024/2025, masih terdapat sejumlah sekolah yang tidak melakukan sinkronisasi selama dua semester berturut-turut sehingga data dinyatakan kadaluwarsa dan usulan program pendidikan otomatis ditolak sistem KRISNA.

Dari aspek kualitas data, penelitian menemukan adanya kesenjangan signifikan antara kondisi ideal dan kondisi aktual di lapangan. Permasalahan utama meliputi keterbatasan operator terlatih, frekuensi sinkronisasi yang tidak memenuhi standar minimal, keterlambatan input data, rendahnya kelengkapan data sarana prasarana, ketidaksesuaian jumlah siswa dengan kondisi nyata, serta lemahnya pengawasan kepala sekolah. Kondisi tersebut menghasilkan data yang kurang akurat sehingga menurunkan reliabilitas DAPODIK sebagai dasar pengambilan kebijakan pendidikan daerah.

Secara keseluruhan, faktor pendukung keberhasilan sistem DAPODIK meliputi kompetensi operator, ketersediaan sarana teknologi, dukungan kepala sekolah, kelengkapan dokumen administrasi, serta regulasi yang jelas dari pemerintah pusat. Sebaliknya, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya kompetensi teknis operator, kendala geografis, minimnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan anggaran operasional (Sumber: Wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, 2025).

Berdasarkan seluruh temuan, penelitian menyimpulkan bahwa sistem administrasi dan operasional DAPODIK di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih mengalami disfungsi sistemik yang berdampak pada rendahnya kualitas data pendidikan dan efektivitas pengambilan keputusan kebijakan. Solusi yang diperlukan meliputi penguatan kapasitas operator melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur internet khususnya di wilayah terpencil, optimalisasi pengawasan kepala sekolah dan dinas pendidikan, penambahan tenaga operator khusus di setiap sekolah, serta penguatan sistem koordinasi dan validasi data secara berkala. Langkah tersebut

menjadi penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola data pendidikan dan mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan secara lebih efektif dan akurat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen data pendidikan melalui Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) belum berjalan optimal dan masih mengalami disfungsi sistemik pada aspek administrasi, pelaporan, database, sistem pencarian, serta pengelolaan data secara keseluruhan. Secara konseptual, kondisi ini bertentangan dengan perspektif *New Public Administration* yang menekankan pentingnya akuntabilitas, responsivitas, dan *evidence-based decision making* dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor pendidikan. Kualitas pengelolaan data DAPODIK pada tingkat daerah menjadi instrumen strategis dalam mendukung efektivitas kebijakan pendidikan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.

Dalam perspektif Sistem Informasi Manajemen (SIM), Davis (2009) mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sistem terintegrasi yang berfungsi mendukung operasional organisasi, proses manajemen, dan pengambilan keputusan. O'Brien dan Marakas (2010) menegaskan bahwa keberhasilan sistem informasi bergantung pada kualitas proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi informasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh komponen SIM dalam DAPODIK di Kabupaten TTS mengalami gangguan, sehingga fungsi sistem informasi sebagai dasar pengambilan keputusan belum berjalan efektif.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa lemahnya kualitas data DAPODIK sejalan dengan prinsip *Garbage In, Garbage Out* (GIGO) yang dikemukakan Davis (1993), bahwa kualitas output sistem sepenuhnya ditentukan oleh kualitas data yang diinput. Data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak diperbarui secara berkala menyebabkan keluaran sistem menjadi bias dan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Kondisi ini terbukti di Kabupaten TTS, di mana buruknya kualitas data menyebabkan sistem KRISNA menolak berbagai usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan sehingga alokasi anggaran menurun drastis sebesar 96,5%, dari Rp15,6 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp543 juta pada tahun 2025.

Pada aspek administrasi dan operasional, implementasi prosedur DAPODIK belum berjalan sesuai regulasi Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015. Hambatan utama meliputi keterbatasan jaringan internet, kondisi geografis yang sulit dijangkau, operator sekolah yang merangkap tugas sebagai tenaga pengajar, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan administratif. Kondisi ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edward III (1980) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan Arwandi, Damopolii, dan Hasan (2024) juga memperkuat bahwa beban kerja operator menjadi salah satu faktor dominan penyebab keterlambatan dan kesalahan input data.

Pada sistem pelaporan, penelitian menemukan bahwa laporan DAPODIK masih bersifat reaktif karena hanya mengikuti jadwal sinkronisasi nasional, bukan kebutuhan informasi daerah. Menurut Niken (2010), sistem pelaporan seharusnya mampu menyediakan laporan periodik yang akurat bagi pengambil keputusan. Namun di Kabupaten TTS, lemahnya kualitas laporan menyebabkan terjadinya *information deficit* sebagaimana dijelaskan Ingraham dan Lynn (2004), yaitu kondisi ketika pemerintah daerah tidak memperoleh informasi yang tepat waktu dan akurat untuk menyusun kebijakan secara efektif. Penelitian Damayanti, Pratiwi, dan Sanusi (2024) merekomendasikan audit data berkala dan penguatan pengawasan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas laporan DAPODIK.

Pada sistem database, meskipun secara arsitektur DAPODIK telah menggunakan sistem

terpusat yang ideal, implementasi di Kabupaten TTS masih menghadapi berbagai kendala berupa perangkat keras yang usang, tidak adanya sistem *backup* rutin, duplikasi data, keterlambatan sinkronisasi, dan rendahnya integritas data pada tingkat sekolah. Kondisi ini sejalan dengan teori Davenport (1997) yang menyatakan bahwa kualitas data ditentukan oleh empat dimensi utama, yaitu akurasi, ketepatan waktu, relevansi, dan kelengkapan. Ketidakmampuan memenuhi dimensi tersebut menyebabkan kualitas database menurun dan berdampak langsung pada rendahnya efektivitas pengambilan keputusan pendidikan.

Pada sistem pencarian data, penelitian menemukan bahwa proses pencarian informasi masih bersifat reaktif, lambat, serta menghasilkan data yang sering tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Mulyanto (2009) menjelaskan bahwa kualitas informasi sangat ditentukan oleh akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu data. Ketidaksesuaian data yang ditemukan dalam sistem DAPODIK menyebabkan berbagai keputusan pendidikan, seperti distribusi guru, penyaluran bantuan pendidikan, hingga rehabilitasi sarana sekolah, menjadi kurang tepat sasaran.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan manajemen data DAPODIK di Kabupaten TTS bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan sistemik yang dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya kompetensi operator sekolah, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan anggaran operasional, serta kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan seluruh rantai sistem informasi pendidikan mengalami disfungsi sehingga kualitas kebijakan pendidikan menjadi tidak optimal. Sebagaimana dijelaskan Griffin (2021), efektivitas manajemen organisasi menuntut kemampuan menganalisis faktor internal dan eksternal secara komprehensif sebagai dasar tindakan rasional.

Berdasarkan temuan tersebut, perbaikan sistem memerlukan intervensi terintegrasi melalui peningkatan kapasitas operator sekolah secara berkelanjutan, penyediaan infrastruktur internet di wilayah terpencil, pengadaan perangkat teknologi yang memadai, penguatan pengawasan dan audit data secara berkala, penambahan tenaga operator khusus pada setiap sekolah, serta penguatan koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan validitas data pendidikan, memperkuat tata kelola berbasis data, serta memastikan kebijakan pendidikan daerah dapat dirumuskan secara lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen data DAPODIK di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum berjalan optimal dan secara langsung memengaruhi kualitas pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. Permasalahan utama ditemukan pada aspek administrasi dan operasional, sistem pelaporan, database, serta sistem pencarian data yang belum berfungsi efektif. Ketidaktepatan input data, rendahnya frekuensi sinkronisasi, keterbatasan kelengkapan data sarana prasarana, lemahnya sistem pelaporan periodik, serta rendahnya integritas database menyebabkan data pendidikan tidak merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Kondisi ini berdampak serius terhadap proses perencanaan kebijakan, ditunjukkan dengan penurunan drastis alokasi DAK Fisik Pendidikan dari Rp18,1 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp543 juta pada tahun 2025, sehingga memperkuat prinsip *Garbage In, Garbage Out* bahwa kualitas keputusan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dikelola.

Faktor yang memengaruhi kualitas manajemen data DAPODIK terdiri atas faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi keberadaan regulasi yang jelas, kompetensi sebagian operator sekolah, dukungan kepala sekolah, sistem validasi otomatis,

program bimbingan teknis, serta koordinasi digital antaroperator. Sebaliknya, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya kompetensi sumber daya manusia operator, keterbatasan perangkat teknologi, lemahnya koordinasi dan pengawasan kelembagaan, keterbatasan anggaran operasional, serta permasalahan integritas data. Hambatan tersebut membentuk disfungsi sistemik yang menyebabkan rendahnya kualitas data, ketidaktepatan keputusan, dan tidak optimalnya anggaran pendidikan daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, perbaikan manajemen data DAPODIK memerlukan intervensi terintegrasi melalui penguatan kapasitas operator secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur internet terutama di wilayah terpencil, penyediaan perangkat teknologi yang memadai, audit dan pengawasan data secara berkala, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan keterlibatan kepala sekolah dalam verifikasi data. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan validitas data pendidikan, memperkuat tata kelola berbasis data, serta memastikan kebijakan pendidikan daerah dapat dirumuskan secara lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Mamary, Y., Shamsuddin, A., & Aziati, N. (2015). Nvestigating The Key Factors Influencing On Management Information Systems Adoption Among Telecommunication Companies In Yemen: The Conceptual Framework Development. *International Journal Of Energy, Information And Communications*, 6(1), 59-68.
- Annida, & Syahrani. (2022). Strategi Manajemen Sekolah Dalam Pengembangan Informasi Dapodik Di Internet. *Educatioanl Journal: General And Specific Research Vol. 2 No. 1* Februari, 89-101.
- Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational Learning: A Theory Of Action Perspective*. Addison-Wesley.
- Aris, Andriani, D., Romondor, A., & Sari, D. (2016). Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Tiket Pada Pt Nur Rizky Pratama Travel Berbasis Web. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia 2016 Stmik Amikom Yogyakarta*, 6-7 Februa, 25-30.
- Arwandi, Damopolii, & Hasan. (2024). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dapodik di UPT SMPN Barugaia Kepulauan Selayar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2024). *Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Angka 2024*. Bps Kab. Tts.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023*. Kupang: Bps Provinsi Ntt.
- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding Regulation: Theory, Strategy, And Practice (2nd Ed.)*. Oxford University Press.
- Bappenas, Kementerian Keuangan, & Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020-2025). *Dokumen Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Pendidikan – Aplikasi Krisna*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership*. Sage Publications.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical And Empirical Analysis, With Special Reference To Education*. Columbia University Press.
- Bovens, M. (2007). Analysing And Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/J.1468-0386.2007.00378.X>

-
- Bpmp Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). Laporan Evaluasi Pemenuhan Spm Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bpmp Provinsi Ntt.
- Burinskiene, A., & Pipiriene, V. (2013). Adoption Of Information Systems By Trade And Manufacturing Enterprises. *European Integration Studies*, 7, 168-176.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Damayanti, R., Pratiwi, D. N., & Sanusi, S. A. (2024). Implementasi Dan Optimalisasi Dapodik Di Smkn 4 Palopo. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 16(1), 1–18.
- Damayanti, R., Pratiwi, D., & Sanusi, S. (2024). Implementasi Dan Optimalisasi Dapodik Di Smkn 4 Palopo. *Edutech : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi* Vol. 4 No. 3 Agustus-Oktober, 150-156.
- Darawan, & Kunkun, J. (2013). *Manajemen Dan Rekayasa Sistem Informasi*. Pt Refika Aditama.
- Darawan, D., & Kunkun, N. (2013). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Darwis, A. (2009). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Darwis, G. (2009). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Bag II. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Davenport, T. H. (1997). *Information Ecology: Mastering The Information And Knowledge Environment*. Oxford University Press.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, And User Acceptance Of Information Technology. *Mis Quarterly*, 13(3), 319–340.
<https://doi.org/10.2307/249008>
- Davis, G. (1993). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. (Terjemahan Andreas S. Adiwardana). Jakarta: Pt. Pustaka Binaman Pressindo.
- Davis, G. B. (1993). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen* (Diterjemahkan Oleh A. Sinapul). Pt Pustaka Binaman Pressindo.
- Davis, G. B. (1993). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Davis, G. B. (1995). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Pt. Pustaka Binaman. Pressindo.
- Davis, G. B. (2009). *Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, And Development* (2nd Ed.). Mcgraw-Hill.
- Davis. (2009). *The Structure Of Government In Public Service*. New York: Prentice Hall.
- Delone, W. H., & Mclean, E. R. (2003). The Delone And Mclean Model Of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal Of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
<https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2024). *Profil Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024*. Disdikbud Kab. Tts.
- Dokumen Krisna Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2020–2025). *Rekapitulasi Rencana Kegiatan Dak Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020–2025*. Bappeda Kab. Tts.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th Ed.). Pearson Education.
- Edward Iii, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Faridah, S., Saputra, R. I., & Ramadhani, M. I. (2023). Analisis Pengelolaan Data Administrasi Digital Dapodik Di Sman 1 Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Administrasi Sekolah*, 9(2), 57–76.
- Faridah, S., Saputra, R., & Ramadhani, M. (2023). Analisis Pengelolaan Data Administrasi Digital Dapodik Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Terapung : Ilmu – Ilmu Sosial* , Vol. 5, No. 1, Maret, 10-24.

-
- Griffin, R. W. (2021). *Management: Principles and Practices* (13th ed.). Cengage Learning.
- Head, B. W. (2010). Reconsidering Evidence-Based Policy: Key Issues And Challenges. *Policy And Society*, 29(2), 77–94. <https://doi.org/10.1016/J.Polsoc.2010.03.001>
- Hendra, R. (2015). *Perilaku Organisasi*. Pekanbaru: Cv. Mutiara Pesisir.
- Herbert A. Simon. (dalam Kadarsah, S., 2011). *Sistem Pendukung Keputusan: Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hood, C. (1991). A Public Management For All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/J.1467-9299.1991.Tb00779.X>
- Hutahaean, J. (2015). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ingraham, P. W., & Lynn, L. E. (Eds.). (2004). *The Art Of Governance: Analyzing Management And Administration*. Georgetown University Press.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405x\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-X)
- Jogiyanto. (2009). *Teknologi Sistem Informasi Edisi Tiga*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kadarsah, S. A. (2011). *Sistem Pendukung Keputusan*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). *Organizational Stress: Studies In Role Conflict And Ambiguity*. Wiley.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan*. Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Buku Saku Petunjuk Teknis Pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dasar Dan Menengah Tahun Ajaran 2024/2025*. Jakarta: Setditjen Paudikdasmen.
- Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah. (2024). *Buku Saku Petunjuk Teknis Data Pokok Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun Ajaran 2024/2025*. Kemendikdasmen.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan*. Kemendikbudristek.
- Kusrini. (2007). *Konsep Dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*. Andi Offset.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas Of The Individual In Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Ludwig, B. G., & Reynold, J. M. (1991). *Systems Analysis: Analytic Concepts In Extension Education*. Ohio State University Extension.
- Ludwig, J., & Reynold, J. (1991). *Statistical Ecology. A. Primer On Method On Competing.*. New York: Jhon Willey And Sons.
- Mcleod, R., Jr. (2001). *Sistem Informasi Manajemen (Diterjemahkan Oleh Hendra Teguh, Ed. 7)*. Pt Prenhallindo.
- Miles, M., & Huberman, M. (2007). *Qualitative Data Analysis (Terjemahan)*. Jakarta : Ui Press.
- Muliana, S. A., Simatupang, N., Wahyuddin, C., & Nurmiati. (2020). *Muliana, Et Al. . Pengantar Manajemen*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Mulyanto, A. (2009). *Sistem Informasi Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murdick, R. G., Ross, J. E., & Calaggett, J. R. (1997). *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern (Ed. 3)*. Erlangga.
- Nasrullah, M. (2015). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi Di Universitas Negeri Makassar. *. Administrasi Publik*, 5(1), 53-63.

-
- Nasyirwan, N. (2015). Nasyirwan, N. (). Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan Oleh Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan. *Manajer Pendidikan. Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 9(6), 724-736.
- Niken, S. (2010). *Sistem Informasi Manajemen: Komponen Fungsional dan Operasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nofa, W. (2018). Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web Pada Sekolah Islam Al-Fauzien. *Jurnal Informatika*, 14(3), 13-20.
- Novaliendry, D., & Zahra, F. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Aplikasi I-Dapodik Berbasis Ahp Dengan Metode Waterfall Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8359-8368.
- Novaliendry, D., & Zahra, F. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Aplikasi I-Dapodik Berbasis Ahp Dengan Metode Waterfall Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. *Jurnal Teknologi Informasi Pendidikan*, 15(1), 40–55.
- Nursugustin, & Nasution, M. (2024). Strategi Manajemen Data Yang Efektif Untuk Meningkatkan Kinerja Basis Data. *Kampus Akademik Publising Jurnal Ilmiah Nusantara (Jinu) Vol.1, No.4 Juli*, 705-710.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2010). *Management Information Systems* (10th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- O'toole, L. J., Jr., & Meier, K. J. (2004). Desperately Seeking Selznick: Cooptation And The Dark Side Of Public Management In Networks. *Public Administration Review*, 64(6), 681–693. <https://doi.org/10.1111/J.1540-6210.2004.00415.X>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2021). *Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Timor Tengah Selatan 2020-2024*. Soe: Bappeda Kabupaten Tts.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kemendagri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Kemendikbudristek.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions In Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rusdiana, A., & Irfan, M. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Schultz, T. W. (1961). Investment In Human Capital. *American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Simon, H. A. (1960). *The New Science Of Management Decision*. New York: Harper & Row.
- Singh, A. (2005). *Software Engineering*. Second Edition, New Age. International. New Delhi: Alhir Sinan.
- Sirajuddin, D. S., & Winardi. (2012). *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Citra Intrans Selaras.
- Sitanggang, Rahmi, & Sihombing. (2018). *Manajemen Sistem Informasi Dalam Organisasi*. Universitas Indonesia Press.
- Sitanggang, W. S., Rahmi, E., & Sihombing, M. (2018). *Pengaruh Sistem Informasi Manajemen*

-
- Terhadap Pengambilan Keputusan Pada Badan Pertanahan Nasional Medan. *Journal Of Information Technology And Accounting* Vol. I, No. 1, Januari, 17-26.
- Stoner, J. A., & Freeman, R. (2000). *Manajemen*, Cetakan Kelima, Jilid Kesatu. Jakarta: Intermedia.
- Sucahyowati, H. (2017). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Malang: Wilis.
- Sudirman, A., Muttaqin, Purba, R., Wirapraja, A., Abdilah, L., Fajrillah, . . . Simarmata, J. (2020). *Sistem Informasi Manajemen*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sudirman, Et Al. (2020). *Manajemen Data Dalam Sistem Informasi*. Yayasan Ahmar Cendekia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukri, M., Aryanto, & Diansyah, R. (2019). Evaluasi Tingkat Penerimaan Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (Tam) (Studi Kasus : Pemutakhiran Data Pip Menggunakan Aplikasi Dapodik). *Jurnal Fasilkom* Volume 9 No.2 | Agustus, 396-406.
- Suranto, A. (2019). *Perencanaan & Evaluasi Program Komunikasi*. Yogyakarta: Pena Pressindo.
- Suranto. (2019). *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan*. Bpfe Yogyakarta.
- Sutabri, T. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Andi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undp. (1997). *Governance For Sustainable Human Development: A Undp Policy Document*. United Nations Development Programme.
- Utama, D., Herlambang, A., & Aryadita, H. (2019). 'Kualitas Dan Kesuksesan Implementasi Sistem Pelaporan Nilai Di Sekolah Menengah Atas Dengan Menggunakan Expectationconfirmation Model Dan. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (J-Ptiik)* Universitas Brawijaya, 3.2, 88–97.
- Van Dijk, J. (2006). *The Network Society: Social Aspects Of New Media* (2nd Ed.). Sage Publications.
- Vasilevska, D., Rivza, B., Alekneviciene, V., & Pralinska, A. (2017). Analysis Of The Demand For Distance Education At Eastern And Central European Higher Education Institutions. *Journal Of Teacher Education For Sustainability*, 19(1), 106-116.
- Wahyuni, E. (2015). Pengaruh Karakteristik Pekerjaan Dan Pemberdayaan Terhadap Kinerja Operator Sd Negeri Di Jakarta Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6.1, 997-1006.
- Wahyuni, Et Al. (2018). Data Pokok Pendidikan: Implementasi Dan Optimalisasi Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Manajemen Pendidikan Nasional*, 4(3), 201–218.
- Wahyuni, N., Jastica, M., & Nugraha, F. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tingkat Smk. *Jurnal Sistem Informasi*, 1.2, 87095.